

Globalisasi dan Jalan Pragmatisme¹

Oleh: Ferdiansyah R

Tahun lalu, profesor ekonomi-politik internasional Harvard University, Dani Rodrik, menulis sebuah artikel yang berjudul *Tantangan Baru Pendukung Merkantilisme*. Pada tulisan tersebut, ia membahas kemunculan kembali kaum penyokong mazhab merkantilisme ekonomi--golongan pendukung sistem yang menuntut peran aktif negara dalam mengakomodasi hubungan rakyat dan pasar--di tengah tren globalisasi dan perdagangan bebas berbasis hukum ekonomi pasar seperti saat ini.

Tiongkok pun dijadikan alibi. Rodrik menganggap keajaiban ekonomi Tiongkok sebagai produk dari suatu pemerintah yang mendukung, merangsang, dan secara terbuka menyubsidi produsen industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sangat tepat, Tiongkok merupakan contoh paling *fresh* tentang bagaimana baiknya sinergitas negara dan pasar yang dapat menjadi alat menciptakan kemakmuran. Tiongkok berhasil meraup keuntungan dari pasar bebas dan investasi asing dengan tetap mempertahankan sistem komunisme di tataran politik domestiknya. Dengan jumlah penduduk yang besar--yang berarti juga menandakan luasnya pasar--dan dibalut dengan kepastian hukum dan nasionalisme yang tinggi, Tiongkok berhasil menaikkan posisi tawar dalam mendatangkan perusahaan-perusahaan asing yang mau patuh pada kebijakan dalam negerinya.

Menarik kemudian untuk mempertanyakan, apakah Tiongkok berdiri sendiri dalam menjalankan model ekonomi politik seperti itu?

Jika diperhatikan lebih lanjut, sesungguhnya, hampir tidak ada lagi negara maju yang menjalankan ideologi secara kaku. Amerika Serikat sang penyeru liberalisasi ekonomi pun juga begitu. Contoh yang lumrah, ketika tahun 2009 terjadi krisis ekonomi di AS yang mengakibatkan runtuhnya fondasi perusahaan-perusahaan besar, pemerintahan Obama memberikan dana *bailout* hingga miliaran dolar. Seharusnya jika AS memang percaya pada *laizzes faire* (ekonomi pasar), ia akan membiarkan mekanisme *invisible hand* berjalan.

Robert Dahl, dalam bukunya *On Democracy*, pernah mendaftar beberapa perilaku ekonomi AS yang dengan sangat gamblang mencerminkan bagaimana tingginya peran negara. Misalkan, uang

¹ Tulisan ini dimuat dalam kolom opini beritasatu.com 18 Februari 2014

pensiun bagi para lanjut usia, kebijakan fiskal untuk menghindari represi dan inflasi, keamanan makanan, pengobatan, penerbangan, perkeretaapian dan perjalanan, pendidikan, asuransi kesehatan, penjualan saham dan obligasi, penetapan standar-standar pembangunan, serta penetapan tarif dan jatah impor.

Kemudian, dalam konteks perdagangan internasional, daftar kasus sengketa yang masuk ke dalam Dispute Settlement Body WTO jelas menunjukkan tuduhan pelanggaran regulasi terhadap Tiongkok malah relatif lebih sedikit (31 kasus), bila dibandingkan dengan AS (121 kasus dan terbanyak). Beberapa kasus seperti US-Brasil Orange Juice Anti-Dumping Administrative dan US-Indonesia Clove Cigarettes, malah menunjukkan kebijakan AS yang sangat ingin memberi perlindungan terselebung terhadap kepentingan domestiknya. AS seolah berpikir, jalan saja dulu dengan mengedepankan kepentingan nasional, *complain* bisa diurus belakangan.

Fakta ini dapat menjadi indikasi tingginya peran negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Selain karena menjadi cerminan tingginya peran negara dalam mendistorsi pasar, juga karena menjadi cerminanan partisipasi aktif negara dalam forum internasional yang terkait dengan kepentingan ekonomi domestik.

Fenomena Tiongkok dan AS ini jelas memberi petunjuk bahwa sampai saat ini peran negara masih amat besar. Pasar dan negara masih tetap bersinergi demi tercapainya berbagai kepentingan. Sah-sah saja sebenarnya, karena apa pun bentuk tata kelola negara, mutlak semua harus bermuara pada ketenteraman dan kesejahteraan rakyat. Lalu pertanyaannya, merkantilismekah ini? Atau pragmatisme?

Kishore Mahbubani menjawab hal ini dalam *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to East*. Ia berpendapat bahwa dunia saat ini sedang berada dalam fase yang teramat kompleks sepanjang sejarahnya. Setiap negara yang menjalani ideologi tertentu secara kaku pasti akan gagal, dan hanya menciptakan bahaya bagi dalam negerinya dan dunia. Pragmatisme adalah *the best guiding spirit* yang dapat kita andalkan saat menjelajahi abad baru ini. Hal inilah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat.

Fakta-fakta dan pendapat-pendapat di atas tentu menyiratkan sesuatu bagi Indonesia. Di negeri ini, angin globalisasi sebenarnya sudah berada di hampir setiap sudut rumah. Coba lihat

bagaimana senyum sumringah anak-anak muda Indonesia ketika memakai celana jin yang mereknya berasal dari Eropa, makan *fast food* di restoran *franchise* asal Amerika Serikat, serta *Twitter*-an pakai ponsel cerdas yang mereknya berasal dari Korea Selatan. Jangan dilupakan juga bagaimana ekspansi produk perusahaan-perusahaan Indonesia ke mancanegara.

Pemerintah juga telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas, seperti yang tertuang dalam kerangka kerja World Trade Organization (WTO), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN Economic Community (2015), dan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA). Akan tetapi di tengah gempuran ini semua, masyarakat Indonesia masih banyak yang menolak globalisasi. Mengapa kita tidak ikut menempuh jalan pragmatis saja?

Inilah kemudian yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Indonesia selanjutnya. Negara harus setia menemani rakyat dalam pergulatan ekonomi pasar. Negara harus ikut serta berperan aktif melalui pembuatan kebijakan-kebijakan pragmatis, yang dilandasi perjuangan demi kepentingan nasional. Sementara masyarakat dalam artian lebih luas, harus bisa menjadi individu-individu yang hidup di arena pasar bebas secara sadar dan tidak melupakan negara sendiri, yang biasa disebut "*think globally and act locally*".